

PENGARUH TIPE PETANI DAN EKSPEKTASI HARGA DALAM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT

EFFECT OF FARMER TYPES AND PRICE EXPECTATIONS IN OIL PALM CERTIFICATION

Indah Prabawati Utami^{1*}, Alin Halimatussadiah²

¹Balai TN Siberut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Email: putami.indah@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Email: alin.halimah@gmail.com

*Penulis Korespondensi: putami.indah@gmail.com

ABSTRACT

Certification is a compliance in implementing Best Management Practice (BMP) in oil palm plantation businesses. Participation in certification is influenced by several factors, including socio-economic, demographic, environmental, political and other factors. This study to see the effect of farmer types (independent and scheme farmers) and higher price expectations in implementing oil palm certification. Other determinants also studied included income, education, age, pesticide use, farming experience, and location. Through OLS regression analysis, it is known that the farmer types, higher price expectations, income, pesticide use, farming experience, and location are factors that influence the area of certified oil palm plantations.

Keywords: *Smallholders, Certification, Higher Price, BMP*

ABSTRAK

Sertifikasi merupakan wujud kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Best Management Practice dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Keikutsertaan dalam sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sosial ekonomi, demografi, lingkungan, politik, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh jenis petani (swadaya dan plasma) serta ekspektasi harga yang lebih tinggi dalam penerapan sertifikasi. Faktor lain yang diteliti diantaranya pendapatan, pendidikan, usia, penggunaan pestisida, pengalaman bertani, dan lokasi perkebunan. Melalui analisis regresi OLS, diketahui bahwa jenis petani, ekspektasi harga yang lebih tinggi, pendapatan, penggunaan pestisida, pengalaman bertani, dan lokasi perkebunan menjadi faktor yang mempengaruhi luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi.

Kata kunci: Petani Kecil, Sertifikasi, Harga, BMP

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting bagi dunia sebagai salah satu sumber minyak nabati. Jenis komoditas tersebut mampu menjanjikan keuntungan yang besar bagi pelaku usahanya. Selain itu, komoditas ini juga merupakan komoditas tanaman perkebunan

yang perkembangan perluasannya paling besar dibandingkan komoditas tanaman lainnya (Pacheco, Gnych, Dermawan, Komarudin, & Okarda, 2017). Hal serupa juga berlaku di Indonesia, yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas penting yang membantu pembangunan ekonomi negara. Kelapa sawit mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 3,5% dari total PDB, dengan nilai eksportnya yang mencapai US\$ 21,4 Miliar pada tahun 2018. Selain itu, usaha perkebunan kelapa sawit juga termasuk jenis industri padat karya (referensi...). Hal tersebut terlihat dari total penyerapan tenaga kerja yang mencapai 2,6 juta orang petani swadaya dan 4,3 juta orang pekerja. Industri kelapa sawit yang dikelola perusahaan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,2 juta orang pekerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, 2019b). Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia kini tak hanya terbatas pada produksi minyak mentah (CPO), melainkan juga telah merambah sektor lain. Hilirisasi kelapa sawit kini mulai mencakup produk oleopangan, oleokimia, dan biofuel (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, 2019a). Industri biofuel Indonesia yang berbasis kelapa sawit mulai gencar dikembangkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Pengembangan biofuel di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2006, melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 (GAPKI, 2017).

Kontribusi kelapa sawit, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, ternyata belum mampu mengurangi dampak dari isu negatif yang berkembang di kawasan Uni . Melalui Delegated Act, Uni Eropa menetapkan bahwa minyak kelapa sawit bukan termasuk dalam kelompok sumber energi yang terbarukan. Oleh karena itu, perlu digunakan alternatif minyak nabati lain pengganti kelapa sawit. Hal lain terkait adanya deforestasi yang massif dan luas atas lahan kehutanan akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit juga menjadi isu yang tak kalah penting diperhatikan. Permasalahan tersebut yang kemudian mendorong untuk dilakukan pengelolaan kelapa sawit yang lebih baik dan ramah lingkungan. Praktek manajemen terbaik (best management practice) menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi. Praktik manajemen terbaik (best management practice) mampu memberikan manfaat yang besar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Melalui praktik tersebut, produktivitas kelapa sawit dapat ditingkatkan tanpa mengganggu stabilitas ekosistem lingkungan. Standarisasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjadi indikator bahwa pelaku usaha kelapa sawit telah menerapkan BMP. Standarisasi yang dimaksud berupa sertifikasi perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah telah memberlakukan dua jenis sertifikasi untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu RSPO dan ISPO. Sertifikasi tersebut diperuntukan bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit, baik skala besar maupun kecil. Nursyifani dalam tulisannya tahun 2019 menyebutkan bahwa pada Maret 2019, sertifikasi ISPO baru dilakukan oleh 502 pelaku usaha, yang terdiri dari 493 perusahaan dan 9 koperasi petani. Kesembilan koperasi tersebut meliputi 5 Koperasi Swadaya dan 4 KUD Plasma. Adapun luas lahan perkebunan yang telah tersertifikasi mencapai total 4,1 juta hektar . Adapun jumlah petani kecil yang tersertifikasi RSPO diketahui mencapai jumlah 144.491, dengan rincian sebanyak 5.522 petani kecil swadaya dan 138.969 petani plasma. Luas area perkebunan yang tersertifikasi RSPO sendiri mencapai 397.346 hektar, dengan rincian 23.237 hektar dimiliki petani swadaya dan 337.412 hektar petani plasma (RSPO, 2019).

Petani kecil kelapa sawit merupakan pelaku usaha yang paling sedikit melakukan sertifikasi, termasuk diantaranya adalah petani swadaya dan plasma. Karakteristik yang berbeda diantara keduanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam hal luas lahan yang tersertifikasi. Petani plasma termasuk kelompok petani kecil yang lebih banyak memiliki sertifikasi dibandingkan petani swadaya. Dukungan modal keuangan yang diperoleh petani plasma mendorong mereka untuk dapat melakukan sertifikasi. Berbeda dengan petani

swadaya yang modal pengelolaan perkebunan kelapa sawit berasal dari dana pribadi, meskipun terkadang juga mendapat bantuan modal dari pemerintah (Daubach, 2019). Selain jenis petani, harga menjadi salah satu faktor penting dalam menilai perlu tidaknya sertifikasi. Dikatakan bahwa sertifikasi menjadikan harga produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak tersertifikasi. Harapan akan terwujudnya hal tersebut yang terkadang mendorong petani kecil melakukan sertifikasi (Ibnu et al., 2015). Beragam faktor lain pun menjadi pertimbangan tersendiri bagi para petani kecil untuk ikutserta dalam melakukan sertifikasi sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan best management practice di usaha perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini berfokus pada perbedaan perbedaan sikap yang ditunjukkan petani sawit swadaya dan plasma dalam memandang pentingnya sertifikasi perkebunan sawit yang digarap oleh mereka. Ekspektasi harga yang lebih tinggi juga menjadi hal lain yang akan diteliti. Selain itu, juga untuk memahami lebih dalam faktor yang mendasari keputusan petani dalam melakukan sertifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari Februari hingga Maret 2019. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan cara survey melalui penyebaran kuisioner. Data yang digunakan bersifat cross-sectional, yaitu penggunaan data dalam satu waktu (tahun), yaitu 2019. Lokasi pengambilan data dilakukan di empat provinsi dengan enam kabupaten yang berbeda. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan dasar pemilihan adalah keterkaitan yang erat antara lokasi penelitian dengan praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Subjek penelitian tersebut merujuk pada para petani yang bekerja mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, baik yang telah tersertifikasi maupun tidak.

Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada rumus Slovin. Populasi petani kecil yang terdapat pada enam kabupaten di empat provinsi tersebut berjumlah 213.396 orang (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5% mendapatkan jumlah sampel sebanyak 400 orang petani. Rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

$2+1$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

NE = neglected errors

(Fariani, Suryantini, & Mada, 2018)

Analisis data dengan menggunakan metode statistika hanya dapat dilakukan pada 388 responden. Hal ini dikarenakan setelah dilakukannya pembersihan data, diketahui hanya sebanyak 388 orang yang menjawab secara lengkap pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode pendugaan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Spesifikasi model regresi yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

$$\text{Proporsi_Serti} = \beta_0 + \beta_1 \text{Jenis_Petanii} + \beta_2 \text{Ekspektasi_Hargai} + \beta_3 \text{Lincomei} + \beta_4 \text{Pendidikani} + \beta_5 \text{Usiai} + \beta_6 \text{Pestisidai} + \beta_7 \text{Lama_Tanii} + \beta_8 \text{Provinsii} + \epsilon_i$$

Keterangan:

Proporsi_Serti	: Proporsi luas lahan yang tersertifikasi (%)
Jenis_Petani	: Jenis petani (<i>dummy</i>)
Ekspektasi_Hargai (<i>dummy</i>)	: Ekspektasi harga jual tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi (<i>dummy</i>)
Lincomei	: Pendapatan usaha sawit (dalam bentuk logaritma) (Rp)
Pendidikani	: Pendidikan kepala keluarga (<i>dummy</i>)
Usiai	: Usia petani (tahun)
Pestisidai	: Kecenderungan penggunaan pestisida dalam 5 tahun terakhir (<i>dummy</i>)
Lama_Tanii	: Lama masa pengalaman bertani sawit (tahun)
Provinsii	: Lokasi perkebunan kelapa sawit (<i>dummy</i>)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_8$: Koefisien variabel
ϵ_i	: Residual

Variabel Penelitian

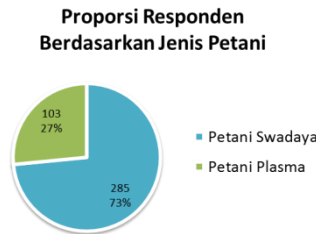
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Selain itu juga digunakan variabel control untuk dapat melihat pengaruh dari variabel lain selain variabel independen utama. Proporsi lahan petani yang tersertifikasi digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Setiap individu petani yang disurvei diberikan pertanyaan mengenai luas lahan perkebunan yang digarapnya disertai dengan proporsi luas lahan yang tersertifikasi.

Variabel independen utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu jenis petani dan ekspektasi harga yang lebih tinggi. Jenis petani yang dimaksud dalam penelitian adalah kelompok petani swadaya dan plasma. Sedangkan ekspektasi harga yang lebih tinggi yang dimaksud adalah ekspektasi petani sawit akan manfaat dari sertifikasi dalam memberikan nilai harga jual tandan buah segar (TBS) lebih tinggi dibandingkan tanpa sertifikasi. Selain kedua variabel tersebut, digunakan pula variabel kontrol yang digunakan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sosial ekonomi demografi petani, aspek lingkungan, dan variabel tambahan lainnya yang mempengaruhi. Variabel kontrol sosial ekonomi demografi petani meliputi pendapatan dari usaha kelapa sawit, pendidikan kepala keluarga, dan usia petani. Adapun variabel aspek lingkungan yang dimaksud adalah jumlah penggunaan pestisida per tahun. Sedangkan variabel kontrol tambahan lainnya adalah lama bertani, lokasi perkebunan kelapa sawit.

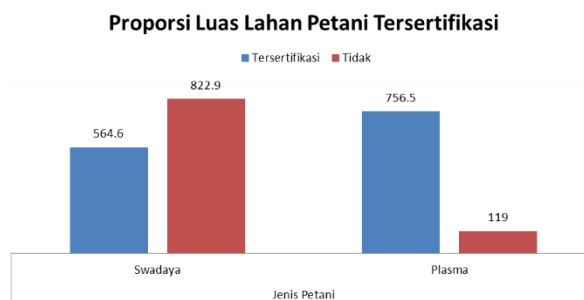
HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Analisis Deskriptif**

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 388 orang responden diketahui sebanyak 285 orang merupakan petani swadaya dan 103 petani plasma. Sebanyak 213 petani swadaya diketahui tidak melakukan sertifikasi atas perkebunan kelapa sawitnya, sedangkan sisanya sejumlah 72 petani memiliki sertifikat. Adapun pada petani plasma, sejumlah 58 orang memiliki sertifikat dan 44 orang tersisa tidak melakukan sertifikasi. Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. Proporsi luas lahan perkebunan kelapa sawit tersertifikasi yang dimiliki oleh petani swadaya dan plasma adalah sebagai berikut: luas lahan perkebunan petani swadaya sebanyak 564,6 hektar dan 756,5 hektar dimiliki oleh petani plasma. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa petani plasma memiliki lahan perkebunan yang telah tersertifikasi lebih banyak dibandingkan dengan petani swadaya.



Gambar 1. Proporsi Berdasarkan Jenis Petani



Gambar 2. Proporsi Luas Lahan Tersertifikasi

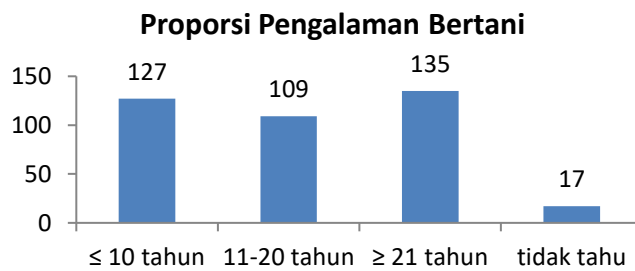
Karakteristik kondisi sosial ekonomi demografi responden yang digunakan dalam penelitian antara lain pendapatan yang diperoleh dari usaha kelapa sawit, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan usia petani. Rerata pendapatan yang dihasilkan oleh petani dari usaha perkebunan kelapa sawit sekitar Rp. 5.382.771, dengan rincian sebesar Rp. 4.209.151 rata-rata pendapatan yang diperoleh petani swadaya dan Rp. 8.630.165 diperoleh petani plasma. Perbedaan tersebut sejalan dengan kepemilikan sertifikasi perkebunan kelapa sawit, yaitu petani plasma diketahui lebih banyak yang melakukan sertifikasi dibandingkan petani swadaya. Hasil pendapatan yang berbeda dapat disebabkan adanya perbedaan harga jual tandan buah segar (TBS) diantara keduanya, yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan keuntungan yang diperoleh.

Adapun rata-rata usia petani yang menjadi responden adalah sekitar 47 tahun dengan rincian: petani berusia antara 25-40 tahun sebanyak 109 orang, usia antara 41-50 tahun sebanyak 135 orang, dan usia diatas 51 tahun sebanyak 144 orang. Sedangkan tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga terbanyak berada pada level SMA atau sederajat sebanyak 153 orang. Jumlah petani yang tidak tamat sekolah dasar diketahui cukup banyak, yaitu sebanyak 57 orang. Sedangkan yang tamatan SD/sederajat, SMP/sederajat, Diploma/sederajat, dan S1/sederajat masing-masing sebanyak 97 orang, 60 orang, 10 orang, dan 9 orang. Petani dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada level S2/S3 tidak berada dalam kelompok responden yang diwawancarai. Sebanyak 2 orang responden tidak memberikan keterangan mengenai tingkat pendidikan terakhirnya.

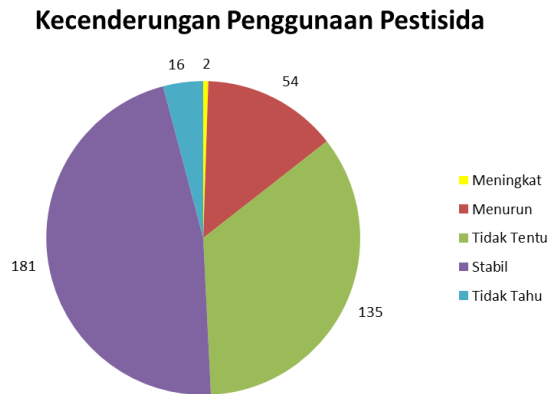
Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Sosial Ekonomi Demografi	% terhadap observasi
Pendapatan (rupiah)	
≤ 2.000.000	16,75%
2.000.001 – 4.000.000	40,46%
4.000.001 – 10.000.000	31,7%
≥ 10.000.001	11,08%
Usia	
25 - 40 tahun	28,09%
41 – 50 tahun	34,79%
≥ 51 tahun	37,11%
Tingkat Pendidikan	
SD/ sederajat dan dibawahnya	39,69%
SMP/ sederajat	15,46%
SMA/ sederajat	39,43%
Diploma/ sederajat	2,58%
S1 s/d S2	2,32%

Melihat karakteristik pengalaman bertani, maka diketahui bahwa rerata petani kelapa sawit yang dijadikan obyek penelitian telah melakukan usaha kelapa sawit selama 16,5 tahun. Pengalaman bertani paling lama yaitu 46 tahun dan paling cepat baru menjalani selama 2 tahun. Diantara petani swadaya dan plasma, maka petani swadaya dikatakan memiliki pengalaman usaha sawit paling lama, sekaligus juga yang paling cepat. Sebanyak 181 petani menyatakan bahwa penggunaan pestisida dalam perkebunannya cenderung stabil/stagnan. Sedangkan 135 petani mengatakan bahwa penggunaan pestisida dalam usaha perkebunan sawit tidak menentu.



Gambar 3. Proporsi Pengalaman Bertani



Gambar 4. Proporsi Penggunaan Pestisida

B. Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai dari uji koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,520, yang berarti bahwa keragaman yang digunakan dalam model dapat dijelaskan sebesar 52%.

Tabel 2. Hasil Estimasi Parameter Variabel Independen

Variabel Dependen : Proporsi Luas Lahan Tersertifikasi		
Variabel Independen	Koefisien	P > t
Variabel Independen Utama		
Jenis Petani (1 plasma, 0 swadaya)	0.1344912***	0.006
Ekspektasi Harga Lebih Tinggi (1 ya, 0 tidak)	0.1461195***	0.011
Variabel Kontrol Sosial Ekonomi Demografi		
Pendapatan (<i>log</i>)	0.0590284***	0.002
Pendidikan (1 = tinggi ; 0 = selainnya)	-0.0019741	0.961
Usia Petani	0.0018011	0.303
Variabel Kontrol Lingkungan		
Penggunaan Pestisida (1 Meningkatkan, 0 selainnya)	-0.5783887	0.000
Variabel Kontrol Lainnya		
Lama Bertani	0.0041991*	0.084
Provinsi (0. Kalimantan Barat)		
1. Sumatera Utara	-0.6446382***	0.000
2. Riau	-0.6448597***	0.000
3. Sumatera Selatan	-0.4240656***	0.000
R-squared	0.520	

Ket.: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa jenis petani plasma secara signifikan dibandingkan dengan petani swadaya mampu meningkatkan proporsi luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi pada tingkat kepercayaan 99%. Perbedaan proporsi luas lahan yang tersertifikasi antara petani plasma dan swadaya sebesar 0,13%, dengan nilai proporsi pada petani plasma lebih besar dibandingkan petani swadaya. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kelompok petani tertentu memperlihatkan kecenderungan untuk melakukan sertifikasi lebih banyak terhadap lahan perkebunannya, dalam hal ini petani plasma. Hal tersebut dapat terjadi karena modal/keuangan petani plasma mendapat dukungan dari perusahaan sponsor yang juga memiliki kepentingan atas sertifikasi yang dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Rofiq, Sayuti, Solikin, Tanjung, & Sahadi, 2014) dalam bukunya yang menyatakan bahwa perusahaan sponsor menjadi mitra utama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang digarap oleh petani plasma. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh (Featherstone & Goodwin, 1993) bahwa kelompok petani yang berasosiasi dengan perusahaan memiliki minat untuk investasi lebih besar pada praktik konservasi.

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit memberikan manfaat bagi petani, diantaranya adalah meningkatkan harga jual tandan buah segar (TBS) menjadi lebih tinggi. Manfaat tersebut yang kemudian diharapkan oleh para petani kelapa sawit mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Melalui sertifikasi diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi petani untuk dapat menjual kelapa sawitnya dengan harga yang lebih tinggi. Hasil estimasi dalam model penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi para petani kelapa sawit atas harga jual TBS yang lebih tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai proporsi luas lahan yang tersertifikasi pada tingkat probabilitas 1%. Petani yang memiliki ekspektasi atas harga jual TBS yang lebih tinggi memiliki proporsi luas lahan yang tersertifikasi lebih besar dibandingkan yang tidak dengan nilai sebesar 0,14%. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa petani miskin (skala kecil) memiliki ekspektasi yang tinggi atas harga jual komoditas perkebunan yang tersertifikasi. Harga jual yang lebih tinggi tersebut dianggap sebagai bentuk kompensasi atas keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Penelitian tersebut juga menjelaskan adanya perbedaan preferensi petani dalam menilai sertifikasi dalam hal adanya perbedaan harga produk. Petani yang tidak melakukan sertifikasi beranggapan bahwa sertifikasi tidak penting, melainkan kualitas produk. Adapun petani yang ikutserta dalam program sertifikasi menilai harus ada perbedaan harga yang signifikan sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas produk yang dijual (Ibnu et al., 2015).

Analisis selanjutnya dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam model terhadap proporsi luas lahan yang tersertifikasi. Variabel kontrol yang dimaksud adalah pendapatan dari usaha sawit, pendidikan kepala keluarga, usia petani, kecenderungan penggunaan pestisida, pengalaman bertani, dan lokasi perkebunan. Sebelum dijalankan perintah regresi pada model, variabel pendapatan ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dilakukan karena data pada variabel pendapatan tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi parameter variabel kontrol sosial ekonomi demografi yang berupa pendapatan, pendidikan, dan usia petani. Pendapatan yang diperoleh dari usaha perkebunan kelapa sawit memberikan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Pendapatan petani yang meningkat sebesar 1% akan mendorong peningkatan proporsi luas lahan yang tersertifikasi sebesar 5,9%. Peningkatan pendapatan mampu memberikan motivasi bagi para petani untuk melakukan sertifikasi perkebunannya. Adanya pendapatan yang lebih besar yang dihasilkan dari usaha perkebunan kelapa sawit dapat mendorong petani untuk mengalokasikan kelebihan dananya untuk melakukan sertifikasi sebagai suatu bentuk investasi masa depan. Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh (Featherstone & Goodwin, 1993)

yang menyatakan bahwa minat petani dalam berinvestasi pada teknik pertanian yang berbasis konservasi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki petani tersebut.

Berdasarkan hasil estimasi model diketahui bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mendorong petani untuk melakukan sertifikasi. Meskipun kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjadi jaminan bahwa petani tersebut akan mensertifikasikan perkebunan kelapa sawitnya. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi tidak sertamerta menjadikan seseorang untuk mau dan ikutserta dalam upaya mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Begitu pula dengan usia petani yang menghasilkan nilai yang tidak signifikan berpengaruh terhadap proporsi luas lahan yang tersertifikasi. Usia tidak bisa menjadi indikator bahwa seseorang akan melakukan atau tidak sertifikasi atas lahan perkebunan kelapa sawitnya. Petani berusia tua ataupun muda dapat memilih untuk ikutserta berpartisipasi mendorong ataupun tidak upaya pengelolaan perkebunan yang menerapkan *best management practice*. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Glasbergen, 2018) yang menyatakan bahwa preferensi petani dalam melakukan sertifikasi lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dibandingkan faktor lainnya.

Penerapan *best management practice* dalam usaha perkebunan kelapa sawit menuntut para petani untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan. Penggunaan pestisida diketahui mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar. Pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek lingkungan hidup dapat menjadi salah satu alasan petani melakukan sertifikasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kecenderungan penggunaan pestisida yang stabil selama kurun waktu 5 tahun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proporsi luas lahan yang tersertifikasi pada tingkat probabilitas 1%. Proporsi luas lahan tersertifikasi pada lahan dengan penggunaan pestisida yang meningkat lebih besar sebesar 57,8% dibandingkan dengan lahan yang cenderung menggunakan pestisida yang menurun, tidak tentu ataupun stabil. Sebuah penelitian yang meneliti tentang sertifikasi pada kopi di Lampung menyebutkan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan sertifikasi. Hal ini dikarenakan petani menganggap bahwa praktik pertanian yang dikelola dan yang pada akhirnya berimbas pada pendapatan mereka bergantung pada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk dipercaya dapat merusak ekosistem lingkungan sehingga mengganggu kegiatan pertanian mereka (Ibnu et al., 2015). Selain itu, penggunaan pestisida dalam praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat juga dikaitkan dengan biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan petani. Biaya tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan petani mempertimbangkan keputusannya dalam menerapkan praktek pengelolaan BMP yang tercermin dalam sertifikasi. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh (Latynskiy & Berger, 2017) dalam penelitiannya bahwa sertifikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan petani dalam melakukan sertifikasi.

Variabel kontrol berikutnya yang akan dianalisis adalah lama pengalaman bertani dan lokasi perkebunan. Pengalaman yang lama dalam usaha perkebunan kelapa sawit memberikan hasil estimasi yang signifikan, yang artinya lamanya masa bertani kelapa sawit memberikan pengaruh terhadap proporsi luas lahan yang tersertifikasi. Penambahan pengalaman bertani selama 1 tahun akan meningkatkan proporsi luas lahan yang tersertifikasi sebesar 0,42 hektar. Hasil yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Jena et.al (2017) yang melakukan penelitian sertifikasi kopi bahwa pengalaman bertani tidak memberikan hasil yang signifikan mempengaruhi petani dalam mengadopsi sertifikasi untuk meningkatkan pendapatan (Jena, Stellmacher, & Grote, 2017).

Hasil estimasi model terhadap variabel provinsi menunjukkan bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit berpengaruh signifikan terhadap proporsi luas lahan yang tersertifikasi pada tingkat

kepercayaan 99%. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang hampir serupa yang membahas tipologi petani. Penelitian yang dilakukan oleh (Jelsma & Schoneveld, 2016) mengungkapkan adanya pengaruh tipologi petani dalam keikutsertaannya dalam mewujudkan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih produktif dan berkelanjutan. Penelitian tersebut menilai perbedaan yang ditunjukkan oleh 6 (enam) kelompok petani yang berbeda, yaitu petani kecil migran, petani kecil asli, petani migran kelas menengah, petani asli menengah, petani skala besar perintis bukaan lahan baru, dan produsen besar terkonsolidasi. Keenam tipe petani tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan pada akhirnya memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai program sertifikasi ISPO, apakah ikutserta atau tidak. Hasil yang signifikan mempengaruhi proporsi luas lahan yang tersertifikasi tersebut ditunjukkan oleh 3 (tiga) provinsi selain Kalimantan Barat. Dibandingkan dengan Kalimantan Barat, maka lokasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara memberikan nilai proporsi luas lahan yang tersertifikasi lebih rendah sebesar 75,79%. Sedangkan lokasi perkebunan kelapa sawit di Riau memberikan nilai proporsi luas lahan yang tersertifikasi lebih rendah sebesar 71,66%. Adapun lokasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan memberikan nilai proporsi luas lahan yang tersertifikasi lebih rendah sebesar 41,22%. Hasil ini menunjukkan bahwa lokasi perkebunan yang berada di provinsi Kalimantan Barat lebih dapat mendorong para petani untuk berpartisipasi dalam penerapan sertifikasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawitnya. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi disebabkan karena peran serta pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan partisipasi petani kecil melalui penyusunan aturan perundangan yang lebih mudah dan menguntungkan. Selain itu, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat juga mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kerjasama dalam membentuk kemitraan kelapa sawit berkelanjutan (Pahlevi, 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jenis petani (petani swadaya dan plasma) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasari keputusan untuk menerapkan BMP yang tercermin dalam proporsi luas lahan yang telah tersertifikasi. Petani plasma memiliki proporsi luas lahan tersertifikasi yang lebih besar dibandingkan dengan petani swadaya. Dengan kata lain, jenis petani ini memiliki kecenderungan untuk melakukan sertifikasi lebih baik daripada petani swadaya. Adapun ekspektasi petani atas harga jual TBS yang lebih tinggi juga diketahui memberikan proporsi luas lahan tersertifikasi yang juga lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Penelitian (Ibnu et al., 2015) menyatakan hal tersebut, yaitu petani skala kecil mempunyai sebuah ekspektasi yang tinggi atas harga jual komoditas yang tersertifikasi.

Pendapatan yang diperoleh petani dari usaha kelapa sawit, penggunaan pestisida yang stabil dalam kurun waktu cukup lama, lama bertani, dan lokasi perkebunan kelapa sawit merupakan faktor-faktor lain yang diketahui dapat mempengaruhi proporsi luas lahan perkebunan yang tersertifikasi. Atau dengan kata lain, faktor tersebut secara statistik dapat memberikan penjelasan atas preferensi petani kecil dalam melakukan sertifikasi perkebunan kelapa sawitnya.

Saran

Pemerintah perlu mendorong petani swadaya untuk meningkatkan partisipasi dalam sertifikasi perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan bantuan modal keuangan yang menjadi salah satu permasalahan dalam tingkat partisipasi mereka. Selain itu, pemerintah pun diharapkan mampu memberikan jaminan harga komoditas

kelapa sawit tersertifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak tersertifikasi. Hal ini guna menjamin tingkat kepercayaan masyarakat petani kelapa sawit akan manfaat sertifikasi yang terkait dengan harga jual produknya. Hal lain yang dapat direkomendasikan adalah terkait dengan lokasi perkebunan kelapa sawit. Dukungan pemerintah dalam pengelolaan kelapa sawit di daerahnya menjadi faktor yang mempengaruhi petani lokal berpartisipasi aktif dalam program sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. (2019a). *Industri Biofuel di Indonesia - BPD_P_Sawit*. Diambil dari <https://www.bpdp.or.id/id/info-grafis/industri-biofuel-di-indonesia/>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. (2019b). *Sawit Komoditas Strategis Indonesia - BPD_P_Sawit*. Diambil dari <https://www.bpdp.or.id/id/info-grafis/en-sawit-komoditas-strategis-indonesia/>
- Daubach, T. (2019). Do smallholders hold the key to sustainable palm oil. Diambil dari <https://www.eco-business.com/news/do-smallholders-hold-the-key-to-sustainable-palm-oil/>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). *Kelapa Sawit 2015-2017*. Jakarta.
- Fariani, A., Suryantini, A., & Mada, U. G. (2018). Technical Efficiency of Smallholders of Oil Palm Cultivation in Ogan Komering Ilir. 29, 196–206.
- Featherstone, A. M., & Goodwin, B. K. (1993). Factors Influencing a Farmer's Decision to Invest in Long-Term Conservation Improvements. *Land Economics*, 69(1), 67–81. <https://doi.org/10.2307/3146279>
- GAPKI. (2017). *Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa*. Diambil dari <https://gapki.id/news/2519/perkembangan-biodiesel-indonesia-dan-keberatan-indonesia-atas-bea-masuk-anti-dumping-uni-eropa>
- Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not Eat Certificates. 147(February), 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.023>
- Ibnu, M., Glasbergen, P., Offermans, A., & Arifin, B. (2015). Farmer Preferences for Coffee Certification: A Conjoint Analysis of the Indonesian Smallholders. 7(6), 20–35. <https://doi.org/10.5539/jas.v7n6p20>
- Jelsma, I., & Schoneveld, G. C. (2016). Mewujudkan Petani Kecil Sawit Mandiri yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia: Pandangan dari pengembangan tipologi petani kecil. <https://doi.org/10.17528/cifor/006334>
- Jena, P. R., Stellmacher, T., & Grote, U. (2017). Can coffee certification schemes increase incomes of smallholder farmers? Evidence from Jinotega. *Environment, Development and Sustainability*, 19(1), 45–66. <https://doi.org/10.1007/s10668-015-9732-0>
- Latynskiy, E., & Berger, T. (2017). Assessing the Income Effects of Group Certification for Smallholder Coffee Farmers: Agent-based Simulation in Uganda. 68(3), 727–748. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12212>
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2017). The palm oil global value chain Implications for economic growth and social and environmental sustainability. <https://doi.org/10.17528/cifor/006405>
- Pahlevi, A. (2018). *Begini, Wacana Kalimantan Barat Kelola Lanskap Sawit Berkelanjutan*. Diambil dari <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/begini-wacana-kalimantan-barat-kelola-lanskap-sawit-berkelanjutan/>

- Rofiq, R., Sayuti, J., Solikin, Tanjung, A. J., & Sahadi. (2014). Buku Panduan: Petani Mandiri Menuju Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan. Yayasan SETARA Jambi & GAPOKTAN Tanjung Sehati.
- RSPO. (2019). RSPO Smallholders Certification by the numbers RSPO. Diambil dari <https://www.rspo.org/smallholders/rspo-smallholders-certification-by-the-numbers>